

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan ini digunakan untuk melihat baik buruknya kinerja keuangan entitas oleh pihak berkepentingan berdasarkan informasi yang disajikan. Pemerintah Indonesia telah merancang reformasi di bidang akuntansi yakni salahsatunya Standar akuntansi pemerintah. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Peraturan pemerintah ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2015. Oleh karena itu, bukan hal asing lagi bagi setiap instansi dalam melakukan pelaporan keuangannya. Adapun manfaat SAP (dalam Undang-Undang No. 71 Tahun 2010) yakni antara lain:

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan.

2.1. Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan memiliki karakteristik yang bersifat normatif. Karakteristik tersebut terdiri dari:

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan

- d. Dapat dipahami

2.1.1. Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Sehingga laporan keuangan yang disajikan memiliki kualitas yang sesuai dengan prinsip akuntasi dan sesuai dengan pemahaman standar akuntansi pemerintah. Prinsip akuntansi yang dimaksud adalah ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan. Menurut Tanjung, Abdul H. (2012:16), terdapat 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yakni:

1. Penyajian wajar (*fair presentation*)
2. Pengungkapan lengkap (*full disclosure*)
3. Konsistensi (*consistency*)
4. Periodisitas (*periodicity*)
5. Substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*)
6. Realisasi (*realization*)
7. Nilai historis (*historical cost*)
8. Basis akuntansi

2.2. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi terdiri dari tiga bagian utama yakni Akuntansi komersial/perusahaan (*commercial accounting*), akuntansi pemerintahan (*govermental accounting*) dan akuntansi sosial (*social accounting*). Anggraini Novi (2017:13) mengemukakan bahwa akuntansi pemerintah merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam melaporkan kinerja pemerintah. Karena merupakan salah satu dari bagian utama akuntansi, maka definisi akuntansi pemerintah tidak terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri serta perkembangannya di Indonesia.

2.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi secara umum merupakan karakteristik dasar suatu individu dalam menunjukkan suatu kinerja yang baik memallui pengetahuan, kemampuan, keterampilan, pengalaman, pendidikan serta perilaku yang etis yang menonjol dan dibutuhkan oleh suatu lembaga atau pun instansi. Menurut Boyatzis (dalam Nur, 2014:112), kompetensi adalah karakteristik yang mendasari individu yang kausal berkaitan dengan kinerja yang efektif atau superior dalam pekerjaan, seperti motif, sifat, keterampilan, aspek sitra diri seseorang/permisosial, atau pengalaman/pengetahuan yang ia gunakan. Menurut Spencer (1993) kompetensi memiliki lima karakteristik yang saling berkombinasi yakni pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*skills*), sikap dan nilai (*self concept*), watak (*traits*) dan motivasi (*motives*). Kemampuan sumber daya manusia adalah kapasitas seseorang

atau individu, suatu organisasi/kelembagaan, atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Beberapa kompetensi sumber daya manusia dalam penyusunan laporan keuangan yakni sebagai berikut:

- a. Pengatahuan (*Knowledge*)
- b. Keterampilan (*Skills*)
- c. Perilaku (*Attitude*)

2.4. Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Di Indonesia, pengelolaan keuangan negara dimulai dengan adanya transaksi keuangan di lingkup satuan kerja di Kementerian Negara/Lembaga. Sebelum penggunaan aplikasi SAKTI, pada tahun 2014 pengelolaan keuangan masih menggunakan Sistem Pembendaharaan Anggaran Negara (SPAN) yang masih merupakan bagian dari *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS). Dalam lingkup satuan kerja tersebut, implementasi IFMIS diwujudkan dalam bentuk beberapa penyempurnaan proses bisnis pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi.

Untuk menjamin bahwa pengguna aplikasi SAKTI dikelompokkan dalam tiga bagian yakni:

- a. *Operator*, merupakan pengguna yang berperan melakukan kegiatan teknis (rekam, input, edit, hapus dan cetak)
- b. *Validator/checker*, adalah pengguna/pejabat yang memeriksa hasil pekerjaan dari operator

- c. *Approver*, adalah pengguna yang berperan melakukan pengesahan atas hasil pekerjaan operator setelah divalidasi.

2.5. Sistem Informasi Akuntansi

Instansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan membutuhkan suatu sistem informasi yang mampu menciptakan dan menghasilkan informasi untuk pihak internal maupun eksternal secara efektif. Sistem informasi yang digunakan tersebut adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Hall (dalam Suhud, 2015) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi dapat diberlakukan pada setiap aktivitas perusahaan yang terbagi ke dalam beberapa subsistem dari sistem informasi akuntansi, yaitu:

- a. Sistem pemrosesan transaksi
- b. Sistem buku besar atau pelaporan keuangan
- c. Sistem pelaporan manajemen

2.6. Kerangka Pemikiran

kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

